

SUNSHINE POLICY DI ERA MOON JAE-IN DAN DAMPAKNYA TERHADAP HUBUNGAN ANTAR-KOREA

Khalilah Mukarramah

*Program Studi Magister Hubungan Internasional
Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia*

khamukarramah@gmail.com

INFO ARTIKEL

Article History

Received

31 December 2022

Revised

23 February 2023

Accepted

27 February 2023

Keywords:

Kim Jong-un; Moon Jae-in; Korea Utara; Korea Selatan; kebijakan luar negeri.

Kata kunci:

Kim Jong-un; Moon Jae-in; North Korea; South Korea; foreign policy.

Abstract

This article aims to describe South Korea's policy towards North Korea during the reign of President Moon Jae-in. By using the conceptual framework of foreign policy and qualitative research methods this research was conducted. The results of the study found that although the foreign policies implemented were more lenient compared to the two policies of the previous conservative government, the Sunshine Policy under the Moon Jae-in government had not succeeded in achieving the desired goal, namely peace on the Korean Peninsula by denuclearizing North Korea. Obstacles to achieving peace on the Korean Peninsula include a lack of public support and strained relations between North Korea and the United States, South Korea's main ally.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Presiden Moon Jae-in. Dengan menggunakan kerangka konseptual politik luar negeri dan metode penelitian kualitatif penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian menemukan bahwa meskipun kebijakan luar negeri yang diterapkan lebih lunak dibandingkan dengan kebijakan dua pemerintahan konservatif sebelumnya, *Sunshine Policy* di bawah pemerintahan Moon Jae-in belum berhasil mencapai tujuan yang diinginkan yaitu perdamaian di Semenanjung Korea dengan cara denuklirisasi Korea Utara. Hambatan untuk mencapai perdamaian di Semenanjung Korea termasuk adalah kurangnya dukungan publik dan hubungan yang tidak baik antara Korea Utara dan Amerika Serikat, sekutu utamanya Korea Selatan.

PENDAHULUAN

Kebijakan luar negeri menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah negara dalam berinteraksi dengan lingkungan di luar batas wilayahnya. Dalam interaksinya dengan negara lain, setiap negara selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai yang biasanya disebut dengan kepentingan nasional. Interaksi antar negara dalam hubungan internasional dapat bersifat kerjasama atau konflik. Sebagaimana yang dikatakan Holsti, hubungan internasional merupakan kumpulan dari konflik dan kerjasama yang terjadi antarnegara (Holsti, 1977).

Semenanjung Korea merupakan wilayah yang tak luput dari perhatian Kajian Hubungan Internasional karena menjadi bukti kuat adanya pengaruh Perang Dingin di kawasan Asia Timur hingga saat ini. Perbedaan ideologi membuat kedua negara di semenanjung tersebut terpisah melalui garis 38° lintang utara yang menandai pendudukan Amerika dan Uni Soviet pada tahun 1945 (Korean Culture and Information Service, 2011). Perbedaan ideologi dan kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara menyebabkan ketegangan sering terjadi di antara kedua negara. Sejak penandatanganan

perjanjian gencatan senjata pada tahun 1953, hubungan kedua negara mengalami berbagai kemajuan dan kemunduran. Dinamika ini secara umum dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil masing-masing pemimpin negara terhadap satu dengan yang lainnya.

Korea Selatan dan Korea Utara hingga saat ini masih berada dalam status perang. Pemerintah Korea Selatan telah menerapkan berbagai kebijakan agar tercipta perdamaian dan unifikasi di Semenanjung Korea. Perdamaian dengan Korea Utara menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh Korea Selatan dalam perjalanan mewujudkan unifikasi. Korea Selatan membentuk badan khusus yakni Kementerian Unifikasi pada 1 Maret 1969 yang bertanggung jawab terhadap segala isu yang berkaitan dengan hubungan antarKorea dan unifikasi. Hingga saat ini, Kementerian Unifikasi masih terlibat dalam berbagai upaya kerja sama Korea Selatan dan Korea Utara untuk meningkatkan hubungan antarkedua negara (Ministry of Unification, 2022).

Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara sempat mengalami peningkatan untuk pertama kalinya pada masa pemerintahan Kim Dae-jung yang menjabat sebagai Presiden Korea Selatan pada tahun 1998-

2003. Meski terdapat kritik terhadap kebijakan yang diusungnya, Kim Dae-jung dinilai sukses dalam menjalankan kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara yang dikenal dengan istilah *Sunshine Policy* (Paik, 2022). Kesuksesan ini ditandai dengan diadakannya *Inter-Korean Summit* untuk pertama kali pada tahun 2000.

Pada masa Presiden Roh Moo-hyun, *Sunshine Policy* dilanjutkan oleh presiden dari partai progresif ini dengan kebijakan *Peace and Prosperity Policy*. Terdapat tiga tahapan yang ingin dicapai dalam kebijakan ini. Pertama adalah menyelesaikan isu nuklir dan memfasilitasi perdamaian di Semenanjung Korea; selanjutnya adalah mengembangkan kerjasama ekonomi dan menetapkan dasar untuk rezim perdamaian; dan terakhir, adalah membentuk rezim perdamaian di Semenanjung Korea. Dalam mencapai hal tersebut, Korea Selatan menerapkan empat prinsip utama, yaitu: seluruh masalah akan diselesaikan melalui dialog, prioritas untuk membangun rasa saling percaya dan menjunjung tinggi asas timbal-balik, isu antar-Korea harus diselesaikan melalui kerjasama dengan institusi internasional, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan kebijakan terhadap Korea Utara. Namun, pada penerapannya kebijakan

ini dinilai tidak efektif karena meskipun Korea Selatan telah bersikap baik melalui pemberian bantuan dan kerjasama, Korea Utara tidak menunjukkan sikap yang diharapkan seperti denuklirisasi dan reformasi kebijakan terhadap Korea Selatan. Bahkan Korea Utara melakukan uji coba peluncuran tujuh rudal, termasuk rudal balistik jarak jauh, Taepodong-2 pada 5 Juli 2006 (Kim H. N., 2006).

Kegagalan terhadap kebijakan yang bersifat rekonsiliasi membuat Korea Selatan mulai mengubah kebijakan terhadap Korea Selatan pada masa pemerintahan Lee Myung-bak. Berkaca pada kebijakan sebelumnya, Presiden Lee Myung-bak yang mulai menjabat pada tahun 2008 memilih pendekatan yang lebih tegas terhadap Korea Utara. Kebijakan dua pendahulu sebelumnya yang berasal dari partai progresif dinilai gagal untuk menciptakan keterbukaan dan perubahan dari Korea Utara. Lee menganggap bahwa bantuan yang diberikan Korea Selatan kepada Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun hanya menambah kemampuan Korea Utara dalam mengembangkan nuklirnya dan memperkuat militernya (Hogarth, 2012). Beberapa kebijakan yang diinisiasikan oleh pemerintahan Lee Myung-bak antara lain *Vision 3000: Denuclearization and*

Openness, Mutual Benefit & Common Prosperity, dan Grand Bargain. Namun, ketiga inisiatif kebijakan tersebut gagal mewujudkan denuklirisasi dan memperbaiki hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Kegagalan ini ditandai dengan peluncuran rudal yang dilakukan Korea Utara pada 5 April 2009, keluarnya Korea Utara dari *Six-Party Talks* dan intensitas konflik yang meningkat antar-ke dua negara seperti peristiwa tenggelamnya kapal perang Cheonan dan konflik yang terjadi di pulau Yeonpyeong di Korea Selatan pada tahun 2010 (Layanan Informasi dan Kebudayaan Korea, 2012).

Pada awal pemerintahan Presiden Park Geun-hye, hubungan Korea Selatan dan Korea Utara telah diwarnai ketegangan. Pada awal tahun 2013, Korea Utara secara sepihak meninggalkan perjanjian gencatan senjata tahun 1953 dan mengumumkan status perang serta memutuskan hubungan militer dengan Korea Selatan. Seperti presiden sebelumnya, denuklirisasi Korea Utara merupakan tujuan utama *Kebijakan Trustpolitik* yang diusung Park Geun-hye. *Trustpolitik* sendiri merupakan sebuah kebijakan yang berbentuk *reward* dan *punishment*. Artinya, Korea Selatan akan membangun hubungan

kerjasama ekonomi dan memberi bantuan apabila Korea Utara bersikap kooperatif dan akan membalas kembali tindakan Korea Utara apabila dinilai melakukan tindakan yang dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian di Semenanjung Korea (Swenson-Wright, 2015).

Trustpolitik memiliki tiga tujuan utama yaitu normalisasi hubungan dua Korea melalui *trust-building*, menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea dan menetapkan dasar bagi proses unifikasi. Korea Selatan kembali gagal dalam membangun hubungan baik dengan Korea Utara dan menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea karena aksi-aksi yang dilakukan oleh Korea Utara secara sepihak. Aksi-aksi tersebut seperti menutup akses ke *Kaesong Industrial Complex* (KIC) yang merupakan kompleks bisnis bentuk kerjasama Korea Selatan dan Korea Utara pada tahun 2013 dan peluncuran beberapa rudal pada tahun 2014. Setelah proses negosiasi panjang, KIC kembali dibuka. Namun, pada akhir pemerintahan Park Geun-hye, hubungan Korea Selatan tidak menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan. Pada Januari 2016, Korea Utara kembali meluncurkan uji coba nuklir yang ke empat

yang berujung pada pemberian sanksi ekonomi oleh PBB, Amerika Serikat dan Korea Selatan. Peluncuran nuklir tersebut diikuti serangkaian uji coba rudal balistik lainnya sebagai respons Korea Utara terhadap isu pembangunan sistem pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) (Howe & Lee, 2016).

Pada 7 Juli 2016, Pemerintahan Park Geun-hye mengumumkan pernyataan bersama dengan Amerika Serikat terkait pembangunan THAAD, yang bertujuan sebagai salah satu cara untuk menjaga keamanan Korea Selatan serta untuk menjaga aliansi pertahanan militer dari senjata nuklir Korea Utara (Tias, 2020). Di tahun yang sama, pemerintah Park Geun-hye kembali menutup KIC yang menjadi simbol perdamaian antara Korea Selatan dan Korea Utara karena adanya tindakan provokatif yang dilakukan Korea Utara seperti uji coba nuklir (Lestari, Karjaya, & Sood, 2021).

Terpilihnya presiden Moon Jae-in pada tahun 2017 yang berasal dari partai progresif memberikan harapan baru terhadap peningkatan hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Moon menerapkan kebijakan yang lebih bersahabat terhadap Korea Utara. Kebijakan ini berhasil mewujudkan *Inter-Korean Summit* pada tahun 2018.

Telah terdapat beberapa kajian terkait kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara. Paik (2022) melihat dampak dan pencapaian dari *Sunshine Policy*. *Sunshine Policy* dinilai telah berhasil membawa Korea Selatan keluar dari krisis moneter tahun 1997, meningkatkan keamanan nasional, mengurangi ketegangan dengan Korea Utara melalui rekonsiliasi dan kerja sama, memberikan dasar yang kuat terhadap persatuan Korea yang damai, serta memperluas dan memperkuat dukungan masyarakat terhadap proses rekonsiliasi dan kerjasama antar-Korea. Paik juga memberikan beberapa rekomendasi terkait beberapa langkah yang masih perlu diambil oleh Pemerintahan Kim Dae-jung dalam hubungannya dengan Korea Utara, antara lain seperti membentuk suatu forum seperti pertemuan menteri antar-Korea, mengatur pertemuan keluarga yang terpisah akibat perang secara berkala, menghapus penyebutan Korea Utara sebagai “musuh utama” dalam Buku Putih Pertahanan, serta menguatkan peran Korea Selatan sebagai mediator antara Korea Utara dan Amerika Serikat (Paik, 2022). Kim (2006) membahas mengenai bagaimana hubungan Korea Selatan dan Korea Utara pada masa pemerintahan Presiden Roh Moo-Hyun dan menganalisis faktor yang berpengaruh

terhadap implementasi kebijakan *Peace and Prosperity Policy*, serta kritikan atas ketidakberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut. Mosler (2022). membahas tentang bagaimana karakteristik kebijakan Moon Jae-in terhadap Korea Utara dan apa pelajaran yang dapat diambil dari kebijakan-kebijakan terhadap Korea Utara sebelumnya untuk menjadi pelajaran di masa yang akan datang. Malevich (2020) membahas tentang manfaat yang mungkin didapat oleh *Sunshine Policy* dan membandingkannya dengan kebijakan yang diterapkan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Lee Myung-bak dan Park Geun-hye.

Berbeda dengan kajian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana implementasi kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara hanya pada masa pemerintahan Moon Jae-in; bagaimana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap hubungan Korea Selatan dan Korea Utara; dan apa yang menjadi hambatan dalam mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea? Sementara signifikansi dari artikel ini yang berkontribusi bagi Kajian Hubungan Internasional adalah memberikan gambaran

dan analitis mengenai kebijakan suatu negara terhadap negara lainnya, dampak dari penerapan kebijakan luar negeri tersebut terhadap hubungan negara serta bagaimana dalam hubungan internasional sebuah kebijakan luar negeri juga dapat terhambat pencapaian tujuannya dikarenakan faktor internal dan eksternal.

KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam artikel ini, konsep kebijakan luar negeri akan digunakan untuk menganalisis *Sunshine Policy* era Moon Jae-In dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan di Semenanjung Korea.

Kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai keseluruhan kebijakan sebuah negara dalam berinteraksi dengan lingkungan lain yang berada di luar batas negaranya. Setiap negara memiliki prioritas agenda kebijakan luar negeri yang berbeda-beda, hal ini bergantung pada kondisi setiap negara. Aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan juga sangat memengaruhi agenda kebijakan luar negeri (Breuning, 2007). Alex Mintz berpendapat bahwa faktor psikologis pemimpin berupa analogi dan pelajaran dari peristiwa masa lalu menjadi faktor yang

berpengaruh terdapat kebijakan luar negeri suatu negara (Mintz & DeRouen, 2010).

Menurut Reynolds, secara logis faktor utama yang memengaruhi kebijakan luar negeri adalah tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut, baik itu keamanan, ekonomi, atau mempertahankan dan mempromosikan nilai. Ahli Hubungan Internasional lain, Rosenau, melihat bahwa kebijakan luar negeri sebuah negara dipengaruhi oleh beberapa faktor internal, antaran lain sumber sistemik yang terdiri dari luas wilayah, geografi, aliansi, struktur negara besar (*great power*); sumber sosial: pembangunan ekonomi, kebudayaan dan sejarah, struktur sosial dan opini publik; dan sumber yang berasal dari pemerintah yang terdiri dari akuntabilitas politik dan struktur pemerintahan (Rosenau, Boyd, & Thompson, 1976). Sementara itu, Holsti mengungkapkan faktor eksternal yang memengaruhi kebijakan luar negeri adalah struktur sistem internasional, tindakan atau kebijakan negara lain, dan masalah global dan regional yang disebabkan oleh aktivitas swasta (Holsti, 1977).

Dalam kasus *Sunshine Policy* di era Presiden Moon Jae-in, kepemimpinan partai demokrat sangat memengaruhi pengambilan kebijakan yang diambil Korea Selatan terhadap Korea Utara. Korea Selatan

berharap dapat mencapai keamanan dan perdamaian di Semenanjung Korea dengan adanya denuklirisasi Korea Utara. Di sisi lain, untuk mencapai tujuan tersebut Korea Selatan terhalang oleh adanya aliansi yang dibangun dengan Amerika Serikat sejak Perang Korea terjadi. Selain itu, kurangnya dukungan masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah dengan munculnya provokasi dari aktivis-aktivis anti-Korea Utara juga menjadi penghambat dalam perwujudan perdamaian di Semenanjung Korea.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam pengumpulan data. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah teknik penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami secara mendalam suatu peristiwa atau realita yang terjadi. Pengumpulan informasi dalam penelitian ini dapat digunakan melalui dokumen-dokumen atau dikenal dengan studi literatur (Raco, 2010:1-3, Creswell, 2009: 178-180). Dalam artikel ini penulis mencoba melakukan studi *literatur review* dari penelitian terdahulu. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dan berita di internet dan menghasilkan sebuah narasi yang bersifat deskriptif dan analitis mengenai kebijakan luar negeri

Korea Selatan ke Korea Utara di era Moon Jae-in.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terhadap Korea Utara di Era Moon Jae-in.

Denuklirisasi Korea Utara menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan yang diambil oleh presiden Korea Selatan. Sama halnya dengan Presiden Korea Selatan sebelumnya, Presiden Moon Jae-in menekankan pentingnya Semenanjung Korea yang bebas dari nuklir. Dalam pidato yang disampaikan di depan majelis nasional pada November 2017, Moon menegaskan bahwa Korea Selatan tidak akan meminta Korea Utara untuk melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea dengan cara-cara paksa dan lebih mengedepankan cara yang damai dalam membangun hubungan dengan Korea Utara (Lee & Botto, 2018; Veriza, Sukyadi, & Triarisanti, 2021).

Kebijakan luar negeri yang diusung Moon Jae-in terhadap Korea Utara merupakan versi baru dari *Sunshine Policy* yang diterapkan pada masa pemerintahan pendahulunya, Kim Dae-jung (1998-2003) dan Roh Moo-hyun (2003-2008). Moon Jae-in melihat bahwa dalam meningkatkan hubungan Korea Selatan dan Korea Utara,

faktor paling penting adalah untuk mempertahankan pencapaian-pencapaian yang positif dari pemerintahan sebelumnya, seperti pernyataan bersama pada tahun 1970-an, perjanjian rekonsiliasi tahun 1990-an, dan juga pernyataan bersama yang dicapai pada masa pemerintahan Presiden Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun (Mosler H. B., 2017).

Dalam pidato yang disampaikan di Körber Foundation di Berlin, Moon Jae-In juga mengungkapkan bahwa Korea Selatan akan mengedepankan cara-cara yang damai seperti dialog dan kerjasama dalam kondisi apapun dan menahan diri dari pemberian ultimatum yang merupakan cara yang tidak disukai oleh Korea Utara untuk mewujudkan tujuan utama yakni perdamaian di Semenanjung Korea. Ia akan menerapkan kebijakan yang bersifat “merangkul” sebagaimana yang dilakukan dua pendahulunya dari partai progresif (Mosler H. B., 2022; Botto, 2020).

Berlin Initiative yang disampaikan Presiden Moon Jae-in memuat lima arah kebijakan, antara lain: menciptakan perdamaian abadi di Semenanjung Korea, mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea namun tetap menjamin keamanan rezim Korea Utara, menciptakan struktur

perdamaian yang permanen di Semenanjung Korea, menyusun peta ekonomi baru di Semenanjung Korea, dan terakhir secara konsisten menjalankan pertukaran dan kerjasama non-politik yang tidak berkaitan dengan situasi politik dan militer (Ministry of Unification, 2022).

Seperti yang tercantum dalam situs resmi Kementerian Unifikasi Republik Korea, kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara di bawah pemerintahan Moon Jae-in memiliki visi untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran di Semenanjung Korea. Dalam mewujudkan kemakmuran Semenanjung Korea, Korea Selatan menerapkan 3 prinsip yaitu: tidak adanya keinginan/harapan akan jatuhnya rezim di Korea Utara, tidak mewujudkan unifikasi dengan cara penyerapan, dan tidak mewujudkan unifikasi melalui alat-alat artifisial. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara adalah resolusi terkait isu nuklir Korea Utara dan perwujudan perdamaian, pengembangan hubungan yang berkelanjutan antar Korea, dan realisasi komunitas ekonomi baru di Semenanjung Korea (Ministry of Unification, 2022).

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan terkait kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara di

masa pemerintahan Moon Jae-in adalah latar belakang Moon Jae-in berasal dari *Democratic Party* yang didirikan oleh Kim Dae-jung. Partai Demokrat sendiri merupakan sebuah partai yang menganut nilai-nilai demokrasi seperti persamaan, perdamaian dan kebebasan. Sehingga ini menyebabkan adanya pengambilan kebijakan yang lebih bersifat damai terhadap Korea Utara (Monday & Rosyida, 2022).

Presiden-presiden dari partai progresif seperti Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun dan Moon Jae-in melihat bahwa Korea Utara bukan merupakan ancaman melainkan sebagai mitra penting untuk menciptakan kemakmuran di Semenanjung Korea dan mewujudkan otonomi Korea Selatan yang lebih besar di Asia Timur (Cho I. H., 2019). Seperti pendahulunya, Moon melihat bahwa perdamaian di Semenanjung Korea dapat diwujudkan melalui dialog dan kerjasama. Moon juga berupaya untuk mengambil kebijakan yang tidak memperkeruh hubungan Korea Selatan dan Korea Utara, seperti mempertimbangkan kembali instalasi THAAD dan mengurangi campur tangan Amerika Serikat dalam kebijakan yang diambil terhadap Korea Utara meski akan tetap bersikap tergas terhadap segala bentuk provokasi. Hal inilah yang membedakan Moon dengan Park yang sangat bergantung

pada Amerika Serikat dalam hubungannya dengan Korea Utara (Richardson, 2018).

Salah satu hal terpenting yang berbeda antara Moon dan Park adalah cara berdiplomasi yang dilakukan keduanya dalam menghadapi Korea Utara, Moon mengedepankan prinsip keterbukaan dalam berhubungan dengan Korea Utara. Prinsip yang diterapkan membuahkan hasil dengan adanya penurunan eskalasi krisis nuklir di Semenanjung Korea pada tahun 2018. Kesuksesan ini berhasil meningkatkan tingkat penerimaan publik terhadap Moon menjadi sekitar 85 persen (Richardson, 2018).

Terdapat empat strategi yang diterapkan Korea Selatan pada masa pemerintahan presiden Moon Jae-in dalam kebijakannya terhadap Korea Utara. Yang pertama, Korea Selatan menggunakan pendekatan yang komprehensif dan step-by-step dalam menyelesaikan isu nuklir Korea Utara. Pendekatan ini menggunakan sanksi dan dialog yang diharapkan dapat mendorong pembekuan nuklir yang kemudian menjadi denuklirisasi secara total. Korea Selatan juga berupaya untuk menghilangkan ancaman keamanan dengan menciptakan rezim damai di Semenanjung Korea serta memfasilitasi

peningkatan hubungan antara Korea Utara dan komunitas internasional (Ministry of Unification, 2022).

Strategi selanjutnya adalah mengatasi masalah dalam hubungan antar Korea dan ancaman nuklir Korea Utara secara bersamaan. Korea Selatan menganggap bahwa keduanya merupakan hal yang tak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Korea Selatan menciptakan jalan dialog dan kerjasama antar-Korea agar dapat memfasilitasi diskusi multilateral terkait resolusi isu nuklir di Semenanjung Korea. Strategi yang ketiga adalah memastikan hubungan berkelanjutan antara keduanya melalui institusionalisasi. Strategi ini dilakukan dengan mendorong adanya National Unification Contract yang berbasis pada konsensus nasional untuk menjamin adanya konsistensi kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara. Selain itu Korea Selatan juga akan menetapkan penjanjian antar-Korea menjadi hukum dan merampungkan *New Inter-Korean Basic Agreement* untuk menciptakan hubungan antar-Korea yang berkelanjutan. Strategi yang terakhir adalah menetapkan dasar untuk unifikasi yang damai melalui kerjasama yang menguntungkan bagi keduanya. Strategi ini

dilakukan dengan cara mengembalikan homogenitas nasional dan membangun komunitas antar-Korea dengan memperluas berbagai pertukaran antar-Korea. Korea Selatan ingin proses unifikasi tanpa paksaan sebagai bagian dari promosi koeksistensi dan kemakmuran dua Korea (Ministry of Unification, 2022).

Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara pada awal pemerintahan Moon Jae-in mengalami pasang surut setelah Korea Utara beberapa kali meluncurkan uji coba rudal balistik. Korea Selatan mengancam uji coba tersebut dan memberikan saksi. Bersama dengan Amerika Serikat dan China, Korea Selatan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan isu nuklir Korea Utara. Pada 14 Desember 2017, Korea Selatan mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dengan China dan sepakat terhadap prinsip-prinsip yang memastikan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah sebagai berikut: (1) perang di Semenanjung Korea merupakan hal tidak dapat diterima oleh kedua negara; (2) berpegang teguh pada komitmen untuk denuklirisasi di Semenanjung Korea; (3) resolusi damai terkait isu-isu Korea Utara termasuk denuklirisasi melalui dialog dan negosiasi, (4) resolusi terkait isu Semenanjung Korea

melalui peningkatan hubungan antar-Korea (Ministry of Unification, 2022).

Korea Selatan di awal pemerintahan Moon Jae-in berusaha untuk menjadi pemimpin dalam upaya peningkatan hubungannya dengan Korea Utara atau dikenal dengan istilah "*led by Korea.*" Upaya ini bukan hanya bertujuan untuk menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea namun juga di kawasan Asia Timur Laut secara keseluruhan. Sehingga, dalam proses tersebut Korea Selatan akan melibatkan negara-negara lain termasuk Amerika Serikat dan China (Mosler H. B., 2022).

Sebagai salah satu upaya untuk membangun hubungan baik dengan Korea Utara, Korea Selatan meminta aliansinya, Amerika Serikat, untuk menunda latihan militer bersama hingga *Pyeongchang Olympic* terlaksana dengan lancar pada awal tahun 2018. Seperti yang diketahui, pemerintah Korea Selatan menggunakan *Pyeongchang Olympic* sebagai salah satu alat untuk dapat berkomunikasi dengan Korea Utara. Perhelatan olahraga tersebut dijadikan instrumen diplomasi yang digunakan pemerintah Korea Selatan untuk bertemu dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi diantara keduanya. Cara ini dapat dikatakan berhasil dengan terlaksananya Konferensi Tingkat Tinggi Korea pada setelah

Pyeongchang Olympic yang menghasilkan dua perjanjian yaitu *Panmunjom Declaration* dan *Pyongyang Joint Declaration of September 2018* (Nadhiva, Suryadipura, & Dewi, 2019; Herdinata, 2019).

Dampak Terhadap Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara

Kebijakan Moon Jae-in membuahkan hasil dengan terwujudnya *Inter-Korean Summit* pada tanggal 27 April 2018 di tahun pertama masa pemerintahannya. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang dikenal dengan istilah *Panmunjom Declaration*. Deklarasi ini dapat dibagi dalam tiga garis besar. Yang pertama, Korea Selatan dan Korea Utara sepakat untuk meningkatkan hubungan kedua negara dengan tujuan kemakmuran dan reunifikasi yang mandiri. Kesepakatan pertama ini dilakukan antara lain dengan menyetujui upaya reunifikasi dan melaksanakan segala keputusan yang telah diambil, membuka dialog tingkat tinggi dan bernegosiasi untuk merealisasikan kesepakatan yang telah dicapai, mendirikan kantor komunikasi bersama di Kaesong, meningkatkan pertukaran dan kerja sama dalam berbagai bidang, membuka dialog Palang Merah untuk menyelesaikan isu kemanusiaan, dan melaksanakan proyek

yang telah disetujui pada Deklarasi 4 Oktober (He-suk, 2018; Choi, 2020).

Kesepakatan kedua yang dicapai Korea Selatan dan Korea Utara *dalam Inter-Korean Summit 2018* adalah kedua negara akan bekerjasama untuk dapat mengurangi ketegangan militer. Hal ini dilakukan dengan cara menghentikan segala bentuk permusuhan, menciptakan zona damai di Laut Barat dekat dengan Garis Batas Utara (Northern Limit Line), dan kedua negara akan mengambil tindakan untuk menjamin proyek pertukaran dan melaksanakan dialog militer. Kesepakatan yang terakhir adalah Korea Selatan dan Korea Utara akan bekerjasama untuk menciptakan perdamaian abadi di Semenanjung Korea. Kesepakatan ini dilakukan dengan persetujuan untuk tidak melakukan aksi militer, mengurangi pengeluaran militer untuk mengurangi ketegangan militer, melaksanakan dialog antar tiga negara baik Korea Selatan-Korea Utara dan Amerika Serikat atau Korea Selatan-Korea Utara dan China untuk mewujudkan perjanjian damai, dan terakhir keduanya menegaskan kembali tujuan untuk menciptakan perdamaian melalui denuklirisasi secara menyeluruh (He-suk,

2018; United Nation General Assembly, 2018).

Presiden Moon Jae-in kembali bertemu dengan Kim Jong-un pada 26 Mei 2018 setelah Kim Jong-un meminta untuk diadakannya pertemuan setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan akan membatalkan US-North Korea Nuclear Summit yang dijadwalkan diadakan pada 12 Juni 2018. Dalam pertemuan tersebut Korea Selatan dan Korea Utara membahas mengenai *US-North Korea Nuclear Summit* dan juga membahas masalah terkait implementasi dari *joint statement* yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya (Mosler H. B., 2022).

Pertemuan pemimpin kedua negara dilanjutkan pada bulan September 2018. Dalam konferensi tingkat tinggi yang berlangsung di Pyongyang tersebut, kedua negara mendiskusikan langkah-langkah lebih lanjut mengenai denuklirisasi Korea Utara dan rencana pelaksanaannya. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un berjanji akan menutup fasilitas uji coba nuklir Tongchang-ri dengan didampingi oleh pengawas independen. Kedua negara juga sepakat untuk mengurangi tensi militer antar kedua negara, meningkatkan komunikasi dan kerjasama serta memfasilitasi lebih banyak reuni keluarga. Dalam pertemuan tersebut,

Menteri Pertahanan Korea Selatan dan Korea Utara juga menandatangani perjanjian militer yang berisi tentang langkah-langkah untuk pelucutan senjata di desa Panmunjom yang dijaga bersama dan dimulai dengan pemusnahan ranjau darat (Cho & Lee, 2018).

Setelah konferensi berlangsung, terlihat beberapa kemajuan dalam hubungan kedua negara. Korea Selatan dan Korea Utara kembali mengadakan reuni keluarga yang terpisah akibat perang setelah terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2015 (DW, Korean families meet across the border, 2018). Selain itu, Korea Selatan dan Korea Utara membuka kantor untuk komunikasi bersama (*liaison office*) pada bulan September 2018 (Mosler H. B., 2022).

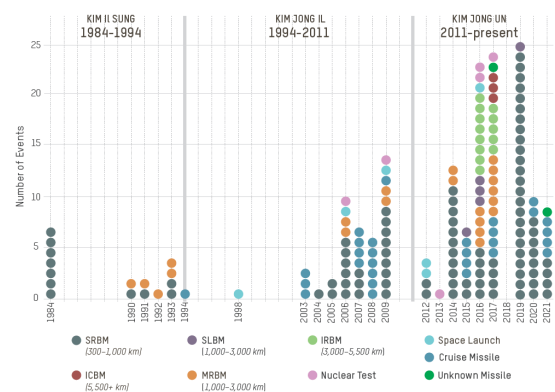
Namun, pada praktiknya beberapa kesepakatan yang dicapai dalam *Inter-Korean Summit 2019* tidak terlaksana seperti pada kesepakatan pengurangan pengeluaran militer. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Korea Selatan, pada tahun 2019 pengeluaran militer Korea Selatan naik menjadi 43 triliun Won atau 8,2 pwesen dari tahun 2018. Pada tahun 2020, pengeluaran militer Korea Selatan naik sebesar 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 50,1 triliun Won. Sementara pada ada tahun 2021, kenaikan pengeluaran militer Korea Selatan adalah

sebesar 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dengan nilai 52,8 triliun Won (Ministry of National Defense, 2022). Berdasarkan data yang dari U.S. State Department's 2021 World Military Expenditures and Arms Transfers, pada tahun 2019 Korea Selatan setidaknya menghabiskan pengeluaran militer sebesar 2,7 persen dari GDP, sementara Korea Utara menghabiskan 26,4 persen dari GDP untuk pengeluaran militer (U.S Department of State, 2021).

Kemajuan dan kemunduran dalam hubungan Korea Selatan dan Korea Utara juga dapat dilihat melalui uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara. Pada Grafik 1 yang menunjukkan jumlah peluncuran rudal secara penuh dan uji coba nuklir Korea Utara, dapat dilihat bahwa pada masa pemerintahan Moon Jae-in (2017-2021) tidak terlihat dampak yang signifikan dalam perubahan perilaku Korea Utara. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan pada masa pemerintahan Kim Dae-jung (1998-2003) dan Roh Moo-hyun (2003-2008). Bahkan jika dibandingkan dengan masa pemerintahan dua pendahulu sebelumnya yang menerapkan kebijakan yang lebih tegas terhadap Korea Utara, Lee Myung-bak (2008-2013) dan Park Geun-hye

(2013-2016), jumlah peluncuran rudal yang dilakukan Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae-in jauh lebih banyak yaitu sebanyak 68 kali. Korea Utara hanya terlihat tidak melakukan uji coba nuklir dan peluncuran rudal secara penuh pada tahun 2018, tahun ketika *PyeongChang Olympic* dan *Inter-Korean Summit* dilaksanakan.

Grafik 1. Peluncuran Rudal dan Uji Coba Nuklir Korea Utara



Accounts for full flight tests only. Does not include partial tests of missile subsystems, such as static engine firings or cold-launch ejection tests, tests of air defense systems, close-range ballistic missiles (CRBMs), short-range rockets, or artillery firings. Updated as of September 2021.

Sumber: Defense Intelligence Agency, 2021

Selain dalam bidang militer, untuk melihat dampak kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae-in juga dapat dilihat dalam bidang ekonomi dengan indikator perdagangan antar kedua negara. Perdagangan antara Korea Selatan dan Korea Utara mengalami titik terendah sejak tahun

1998 pada masa pemerintahan Moon Jae-in. Selama tahun 2017 hingga tahun 2020 volume perdagangan Korea Selatan dan Korea Utara hanya mencapai 42,5 juta dolar AS. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan pada masa kepemimpinan Park Geun-hye (2013-2016) yaitu sebesar 6,5 miliar dolar AS (North Korea in the World, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa masa kepemimpinan Moon Jae-in tidak memberikan dampak signifikan terhadap hubungan perdagangan kedua negara, bahkan setelah *PyeongChang Olympic* dan *Inter-Korean Summit*, hubungan kedua negara tidak menunjukkan adanya perubahan yang berarti.

Korea Utara juga menarik diri dari *liaison office* yang merupakan simbol komunikasi kedua negara pada Maret 2019. Penarikan diri dari kantor tersebut dinilai sebagai respon terhadap buruknya hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat setelah keduanya gagal menciptakan kemajuan setelah dialog kedua negara yang dilaksanakan di Hanoi. Dalam pertemuan kedua negara pada bulan Februari 2019, Amerika Serikat mendesak Korea Utara untuk membuat langkah substansial dalam upaya pelucutan senjata nuklir sehingga dapat meringankan sanksi ekonomi yang dialaminya (Kim & Denyer, 2019).

Ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara berlanjut pada Oktober 2019 Korea Utara memerintahkan Korea Selatan untuk menyingkirkan seluruh bangunan di Kungang Mountain resort yang dimiliki oleh perusahaan Korea Selatan, Hyundai Asan. Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan membangun wilayah pariwisata sendiri dan mendesak Korea Selatan untuk melakukan pembongkaran terhadap situs pariwisata tersebut. Pemerintah Korea Selatan berupaya menawarkan dialog terkait permasalahan tersebut namun Korea Utara hanya membalas melalui pernyataan tertulis (Choi, 2020). awal Maret 2020, kembali mengalami tensi militer ditandai dengan adanya aksi saling tembak menembak di perbatasan. Militer Korea Selatan mengatakan bahwa aksi tembak menembak tersebut terjadi karena tentara Korea Utara memulai aksi dengan menembak ke arah perbatasan Korea Selatan. Namun, tidak ada korban jiwa yang tercatat dalam aksi tersebut (DW, 2022). Pada April 2020, Korea Utara melanjutkan aksi provokasi militernya dengan meluncurkan beberapa rudal jarak pendek tepat sehari sebelum pemilihan nasional diadakan di Korea Selatan. Uji coba ini dianggap sebagai upaya Korea utara untuk mengancam aliansi dan militer Amerika Serikat di Asia (Gallo, 2020).

Masalah Dalam Mencapai Perdamaian di Semenanjung Korea di Era Moon Jae-in

Salah satu masalah atau keterbatasan dalam mencapai perdamaian di Semenanjung Korea sebagai tujuan dari penerapan kebijakan Moon Jae-in terhadap Korea Utara adalah kurangnya peran publik Korea Selatan dalam mendukung hubungan baik dengan Korea Utara. Di negara yang menganut sistem demokrasi, opini publik menjadi salah satu hal penting dalam pertimbangan kebijakan luar negeri, termasuk di Korea Selatan.

Opini publik terkadang membuat diplomasi semakin kompleks di negara demokrasi. Hal ini disebabkan karena pemerintah menjadi lebih bertanggung jawab terhadap kelompok kepentingan dan opini publik. Selain itu, perang dan konflik lebih cenderung terjadi karena adanya mobilisasi masa untuk mempertahankan kepentingan atau ideologi suatu kelompok (Chung, 2003). Kesepakatan yang telah disepakati antarnegara dapat saja batal atau dilakukan negosiasi ulang apabila adanya penolakan dari publik. Setelah gelombang demokratisasi di tahun 1980-an, pengaruh komunitas publik dalam kebijakan luar

negeri Korea Selatan meningkat sehingga menjadikannya faktor penting ketika melihat karakteristik dan perkembangan kebijakan luar negeri Korea Selatan. Adanya demokratisasi telah menciptakan kelompok kepentingan dan kelompok penekan serta merevitalisasi gerakan sipil. Opini publik bukan hanya dapat mengubah sebuah kebijakan namun juga dapat membuat hubungan antar negara menjadi lebih baik atau lebih buruk Jepang (Lee S.-w. , 2020).

Contoh kasus yang dapat menggambarkan kedudukan opini publik di Korea Selatan antara lain bagaimana kematian dua siswi sekolah menengah akibat kendaraan militer Amerika Serikat memunculkan sentimen anti-Amerika pada tahun 2022 dan menjadi salah satu penyebab menangnya Roh Moo-hyun sebagai Presiden Korea Selatan yang percaya bahwa ancaman keamanan yang paling berbahaya di Asia adalah Amerika Serikat dan Jepang (Lee S.-w. , 2020). Contoh lain adalah penundaan penandatanganan *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) dengan Jepang di tahun 2012 pada pemerintahan Lee Myung-bak, 30 menit sebelum jadwal penandatanganan akibat adanya protes sipil (Kim J. , 2018).

Peran publik juga menjadi sangat penting dalam mewujudkan perdamaian antar Korea. Adanya provokasi yang dilakukan oleh aktivis konservatif Korea Selatan dengan mengirimkan balon besar berisi selebaran propaganda yang mengkritik Kim Jong-un, nuklir Korea Utara serta pelanggaran HAM telah memperburuk hubungan kedua negara (Made, 2020). Melalui media KCNA, Korea Utara mengatakan bahwa pihaknya akan menghentikan segala bentuk komunikasi dengan Korea Selatan pada 9 Juni 2020 pukul 12:00. Beberapa hari kemudian Korea Utara menghancurkan bangunan *liaison office* sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Korea Selatan yang gagal untuk mencegah adanya penyebaran selebaran yang berisi provokasi anti-Korea Utara. Sebelumnya Korea Utara telah mengancam untuk menutup penuh *Inter-Korean liaison office* dan kawasan pabrik bersama di Kaesong yang merupakan simbol rekonsialisasi kedua negara. Korea Utara juga mengancam untuk mengakhiri kesepakatan militer yang ditandatangani dengan Korea Selatan apabila Korea Selatan gagal untuk mencegah tindakan yang dilakukan aktivis anti-Korea Utara. Ancaman ini disampaikan oleh Kim Yo Jong, yang merupakan saudara

perempuan dari Kim Jong-un (Talmazan & Kim, 2020).

Selain itu, rendahnya tingkat keinginan publik untuk mendukung unifikasi antara kedua negara. Berdasarkan survei yang dilakukan *Institute for Peace and Unification Studies* (IPUS) di *Seoul National University* pada tahun 2001 terhadap 1.200 pria dan wanita, hanya sekitar 44,6 persen yang menilai bahwa unifikasi perlu dilakukan. Nilai ini merupakan persentase terendah sejak survei pertama kali dilaksanakan pada tahun 2007. Penilaian ini terjadi setelah Korea Utara menutup kantor komunikasi bersama pada tahun 2020 dan adanya pembatalan Hanoi Summit pada Februari 2019. 82,7 persen di antara partisipan menganggap bahwa Amerika Serikat merupakan mitra yang tepat untuk kerjasama sementara 70,7 persen diantaranya menganggap bahwa Amerika Serikat akan membantu Seoul apabila terjadi perang di Semenanjung Korea (Yonhap News Agency, 2021).

Dalam survei lain yang dilakukan oleh Asan Institute for Policy Studies, persepsi publik yang menganggap Korea Utara sebagai “tetangga” lebih rendah di tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 hanya sekitar 49 persen responden menganggap Korea Utara sebagai

tetangga. Persentase ini merupakan persentase terendah sejak tahun 2012, yang pada saat itu sebesar 64.2 persen responden melihat bahwa Korea Utara merupakan tetangga bagi Korea Selatan. Tahun 2020 juga menandai tingginya responden yang menganggap bahwa Korea Utara merupakan musuh bagi Korea Selatan dengan nilai persentase sebesar 37.2 persen. Nilai yang tertinggi selama 10 tahun terakhir sejak 2011 (Kim, Chungku, & GeonHee, 2021).

Selain sisi publik, faktor lain yang menghambat penerapan *Sunshine Policy* pada masa pemerintahan Moon Jae-in adalah hubungan Korea Utara dengan Amerika Serikat. Seperti yang diketahui bahwa Amerika Serikat merupakan sekutu utama bagi Korea Selatan. Amerika menempatkan komando militer di Korea Selatan yang dikenal dengan sebutan United States Forces Korea (USFK).

Setelah selesai dengan isu Irak dan Afghanistan, Amerika Serikat mengubah fokus kebijakan luar negeri dalam hal keamanan menjadi Korea Utara. Bagi Amerika Serikat, nuklir Korea Utara menjadi ancaman besar. Hal ini juga diungkapkan Presiden Barack Obama kepada Presiden Donald Trump ketika pergantian kekuasaan

bahwa Korea Utara merupakan masalah utama bagi keamanan Amerika Serikat. Menurut para ahli, perubahan ini terjadi karena peningkatan sistem senjata nuklir Korea Utara (Bechtol Jr, 2019).

Bagi Korea Utara, latihan militer bersama Amerika Serikat dengan Korea Selatan seringkali dianggap sebagai bentuk provokasi dan hal tersebut memperburuk hubungan kedua negara. Seperti halnya terjadi pada Mei 2018, Korea Utara sempat menunda dialog tingkat tinggi antar-Korea karena Korea Selatan akan melaksanakan latihan militer tahunan dengan Amerika Serikat yang dikenal dengan istilah *Max Thunder*. Korea Utara menganggap hal tersebut merupakan provokasi militer yang disengaja. Oleh karena itu, Korea Selatan dan Amerika Serikat akhirnya sepakat untuk menunda latihan bersama tersebut (Sung-Jun, 2018).

Di masa pemerintahan Donald Trump (2017-2021), hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara juga mengalami pasang surut. Pada tanggal 12 Juni 2018, Donald Trump dan Kim Jong-un bertemu dalam KTT untuk membahas program denuklirisasi. Meski sempat terancam batal akibat saling kritik antara kedua negara, dalam pertemuan yang

diadakan di Singapura tersebut, Amerika Serikat dan Korea Utara sepakat untuk membangun hubungan baru untuk mendukung perdamaian di Semenanjung Korea. Amerika Serikat berkomitmen untuk memberikan jaminan keamanan terhadap Korea Utara dan Korea Utara akan melaksanakan program denuklirisasi secara penuh (The White House, 2018). Amerika Serikat dan Korea Utara bertemu kembali di Hanoi pada KTT di Hanoi pada tanggal 28 Februari 2019. Namun, pertemuan ini tidak membuahkan hasil karena tidak adanya kesepakatan untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang terjadi antara keduanya. Korea Utara meminta Amerika Serikat untuk menarik sanksi ekonomi apabila Korea Utara menutup fasilitas nuklir di Yonbyon. Sementara, Amerika Serikat menginginkan denuklirisasi yang bersifat “*complete, verifiable, dan irreversible dismantlement*” (CVID). Kedua negara kemudian kembali bertemu di Panmunjom, namun tidak ada perkembangan yang berarti setelah pertemuan tersebut, bahkan Korea Utara menolak dialog antar-Korea dan melakukan lebih banyak uji coba nuklir dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Congressional Research Service, 2019; Shin, 2022). Hal ini seperti yang terlihat pada Grafik 1, uji coba nuklir yang dilakukan

sebanyak 25 kali dan merupakan uji coba nuklir terbanyak sejak tahun 1990.

Meskipun sebagian ahli menganggap bahwa hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat di bawah masa pemerintahan Donald Trump dalam kondisi lebih baik dibandingkan masa pemerintahan sebelumnya, namun pertemuan yang sempat terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara tidak memberikan kemajuan dalam hubungan keduanya ataupun hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Hal ini sebagaimana diungkapkan Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Son Gwon, kepada KCNA bahwa kemajuan yang dicapai sebelumnya antar kedua negara hanya dijadikan sebagai sebuah pencapaian oleh Amerika Serikat tanpa memberikan hal baik apapun terhadap Korea Utara. Korea Utara menganggap bahwa Amerika Serikat hanya memberikan janji-janji palsu kepada Korea Utara. Oleh karena itu, Ri juga mengungkapkan bahwa Amerika Serikat masih merupakan ancaman jangka panjang bagi Korea Utara dan rakyatnya dan Korea Utara akan tetap membangun kekuatan militernya untuk melawan segala bentuk ancaman dari Amerika Serikat (Suliman, 2020).

SIMPULAN

Kebijakan yang diterapkan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae-in belum mampu mencapai tujuan utama yang diinginkan yaitu denuklirisasi Korea Utara dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun mengikuti dua pendahulu pemimpin dari partai demokrat sebelumnya yaitu Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun, *Sunshine Policy* di era Moon Jae-in tidak memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap perdamaian di Semenanjung Korea bila dilihat dari rangkaian uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara dan perdagangan antar-Korea pun tidak menunjukkan adanya kenaikan. Kurangnya dukungan publik untuk menyukseskan penerapan kebijakan dan pasang-surutnya hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat menjadi penghambat dalam penerapan dan pencapaian tujuan dari kebijakan yang diterapkan Moon Jae-in.

REFERENSI

- Bechtol Jr, B. (2019, March). The North Korean Nuclear Weapons and Ballistic Missile Threat: An American Perspective. *Journal of Peace and War Studies*(Inaugural issue), 21-44.
- Botto, K. (2020). Moon Jae-in: Putting North Korea at the Center. In G. Rozman (Ed.), *Joint U.S.-Korea Academic Studies 2020 Vol. 31: East Asian Leaders' Geopolitical Frameworks, New National Identity Impact, and Rising Economic Concerns with China* (pp. 84-99). Korea Economic Institute of America.
- Breuning, M. (2007). *Foreign policy analysis: a comparative introduction*. New York: Palgrave Macmillan.
- Cho, I. H. (2019, March). Aligning Autonomy and Alliance: Variation in South Korea's Polict Towards North Korea and Moon Jae-in Presidency. *Journal of Peace and War Studies*(Inaugural Issue), 65-88.
- Cho, J., & Lee, H. K. (2018, September 19). *Moon, Kim sign agreement for North Korea to take further steps to denuclearize*. Retrieved December 25, 2022, from ABC News: <https://abcnews.go.com/International/moon-kim-sign-agreement-north-korea-steps-denuclearize/story?id=57925068>
- Choi, K. (2020). Window of opportunity for a New Détente: "Tight Link Strategy" of Moon Jae- in Administration and ROK-DPRK-US triangle. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 9(1), 29-49.

- Chung, C.-p. (2003). Democratization in South Korea and Inter-Korean Relations. *Pacific Affairs*, 75(1), 9-35.
- Chung-in, M. (2012). *The Sunshine Policy: In Defense of Engagement Amerika Serikat a Path to Peace in Korea*. Seoul: Yonsei University Press.
- Congressional Research Service. (2019, Maret 6). *The February 2019 Trump-Kim Hanoi Summit*. Retrieved Desember 25, 2022, from Congressional Research Report: <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN11067>
- DW. (2018, August 8). *Korean families meet across the border*. Retrieved Desember 6, 2022, from DW: <https://www.dw.com/en/korean-families-meet-briefly-after-65-year-separation/a-45140946>
- DW. (2022, May 3). *North Korea and South Korea exchange fire at the border*. Retrieved Desember 25, 2022, from DW: <https://www.dw.com/en/north-korea-and-south-korea-exchange-fire-at-the-border/a-53315468>
- Gallo, W. (2020, April 14). *North Korea Launches Missiles Ahead of S. Korea Election*. Retrieved from VOA News: https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_north-korea-launches-missiles-ahead-s-korea-election/6187498.html.
- Herdinata, P. A. (2019). Pyeongchang Olympics Amerika Serikat The Peace Instrument to Encourage The Reconciliation in Korean Peninsula. *Indonesian Journal of International Relations*, 3(2), 65-86.
- He-suk, C. (2018, April 27). *[2018 Inter-Korean summit] Panmunjeom Declaration summary*. Retrieved June 25, 2022, from Korea Herald: <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180427000797>
- Hogarth, H.-k. K. (2012, January). South Korea's Sunshine Policy, Reciprocity and Nationhood. *Perspectives on Global Development and Technology*, 11(1), 99-111.
- Holsti, K. J. (1977). *International Politics: A Framework for Analysis* (3rd ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Howe, B. M., & Lee, K. (2016). Trustpolitik: The Failure to Build Trust in Inter-Korean Relations. *Journal of Peace and Unification*, 6.(2), 95-124.
- Jiyoon, K. (2018). Public Opinion and Presidential Power in South Korea. In S. A. Snyder, G. Lee, Y. H. Kim, & J. Kim, *Domestic Constraints on South Korean Foreign Policy* (pp. 38-55). New York: Council on Foreign Relations.
- Kim, H. N. (2006). South-North Korean Relations Under The Roh Moo-Hyun Government. *International Journal of Korean Studies*, 10(Spring/Summer), 37-59.
- Kim, J. (2018). Public Opinion and Presidential Power in South Korea. In S. A. Snyder, G. Lee, Y. H. Kim, & J. Kim, *Domestic Constraints on South Korean Foreign Policy* (pp. 28-55). New York: Council on Foreign Relations.
- Kim, J. J., Chungku, K., & GeonHee, H. (2021). *ASAN Report: Fundamentals of*

- South Korean Public Opinion of Foreign Policy and National Security*. Asan Institute for Policy Studies.
- Kim, M. J., & Denyer, S. (2019, March 22). *North Korea pulls out of liaison office with the South in blow to warming ties*. Retrieved December 25, 2022, from The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/world/north-korea-pulls-out-of-liaison-office-with-the-south-in-blow-to-warming-ties/2019/03/22/89a0b5ee-4c81-11e9-93d0-64dbcf38ba41_story.html
- Korean Culture and Information Service. (2011). *Fact About Korea*. Seoul: Ministry of Culture, Sport and Tourism.
- Layanan Informasi dan Kebudayaan Korea. (2012). *Korea: Dulu dan Sekarang*. Seoul: Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata.
- Lee, C. M., & Botto, K. (2018). *President Moon Jae-in and the Politics of Inter-Korean Détente*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace.
- Lee, S.-w. (2020). Foreign Policy Dilemma in South Korean Democracy: Challenge of Polarized and Politicized Public Opinion. *평화연구*, 28(2), 259-304.
- Lestari, B. U., Karjaya, L. P., & Sood, M. (2021). Analisis Perbedaan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Dibawah Kepemimpinan Park Geunhye dan Moon Jae-in Terhadap Kepemilikan Senjata Nuklir Korea Utara. *Indonesian Journal of Global Disclosure*, 3(1), 81-109.
- Malevich, S. H. (2020). How a Return to the SunshPolicy under President Moon JaeIn will bring Stability to the Korean Peninsula. *Glendon Journal of International Studies*, 11.
- Ministry of National Defense. (2022, December 22). *Defense Budget*. Retrieved December 25, 2022, from Ministry of National Defense of Republic of Korea: https://mnd.go.kr/mbshome/mbs/mndEN/subview.jsp?id=mndEN_030900000000
- Ministry of Unification. (2022, March 14). *Brief Information*. Retrieved from Ministry of Unification of Republic of Korea: https://unikorea.go.kr/eng_unikorea/about/aboutmou/infomation/
- Mintz, A., & DeRouen, K. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. New York: Cambridge Univesity Press.
- Monday, P. I., & Rosyida, H. N. (2022). Motif Moon Jae In dalam merekonsiliasi Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara Melalui Korean Peninsula Peace Initiative. *Al-Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2), 75-86.
- Mosler, H. B. (2017, June). President Moon Jae-in – The Right Choice for South Korea. *Asia Policy Brief*.

- Mosler, H. B. (2022). Lessons learned? South Korea's foreign policy toward North Korea under the Moon Jae-in administration. *Working Papers on East Asian Studies University of Duisburg-Essen, Institute of East Asian Studies (IN-EAST)*(132).
- Nadhiva, F., Suryadipura, D., & Dewi, A. U. (2019). Reorientasi Kebijakan Luar Negeri Republik Korea terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea dalam Upaya Reunifikasi (2017-2019). *Global Strategis*, 13(2), 157-170.
- North Korea in the World. (2022). *Inter-Korean Trade*. Retrieved December 5, 2022, from North Korea in the World: <https://www.northkoreaintheworld.org/inter-korean/inter-korean-trade>.
- Paik, H. (2022). Assessment of The Sunshine Policy: A Korean Perspective. *Asian Perspective*, 26(3), 13-35.
- Richardson, L. (2018, May). Shifts in ROK approaches to the DPRK under. *Strategic Insight*(130).
- Rosenau, J. N., Boyd, G., & Thompson, K. W. (1976). *World Politics: An Intoduction*. New York: The Free Press.
- Shin, M. (2022, Mei 4). *Has Moon Jae-in's North Korea Peace Process Failed?* Retrieved Desember 25, 2022, from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2022/05/has-moon-jae-ins-north-korea-peace-process-failed/>
- Suliman, A. (2020, Juni 12). *North Korea's Kim backs away from Trump relationship two years after historic handshake*. Retrieved February 28, 2023, from NBC News: <https://www.nbcnews.com/news/world/north-korea-s-kim-backs-away-trump-relationship-two-years-n1230371>
- Sung-Jun, C. (2018, Juni 17). *South Korea, US to announce suspension of major military drills this week*. Retrieved Desember 25, 2022, from CNBC: <https://www.cnbc.com/2018/06/17/south-korea-us-to-announce-suspension-of-major-military-drills.html>
- Swenson-Wright, J. (2015). Park Geun-hye, foreign policy innovation and risk on the Korean peninsula. In A. T. Tan (Ed.), *Security and Conflict in East Asia*. Abingdon: Routledge.
- Talmazan, Y., & Kim, S. (2020, Juni 16). *North Korea demolishes inter-Korean liaison office near border amid growing tensions*. Retrieved Desember 25, 2022, from NBC News: <https://www.nbcnews.com/news/world/north-korea-bombed-inter-korean-liaison-office-near-border-south-n1231143>
- The White House. (2018, Juni 12). *Joint Statement of President Donald J. Trump of the United States of America and Chairman Kim Jong Un of the Democratic People's Republic of Korea at the Singapore Summit*. Retrieved Desember 25, 2022, from The White House: <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/joint-statement-president-donald-j-trump-united-states-america-chairman-kim-jong-un-democratic-peoples-republic-korea-singapore-summit/>

- Tias, A. (2020). South Korea and Chinese Conflict Over Thaad: How It Started and The Way It Ended. *Review of International Relations*, 2(2), 80-90.
- U.S Department of State. (2021, December 31). *World Military Expenditures and Arms Transfers 2021 Edition*. Retrieved December 5, 2022, from U.S Department of State: <https://www.state.gov/world-military-expenditures-and-arms-transfers-2021-edition/>
- United Nation General Assembly. (2018, September 10). [Letter dated 6 September 2018 from the representatives of the Democratic People's Republic of Korea and the Republic of Korea to the United Nations addressed to the Secretary-General, Panmunjom Declaration on Peace, Prosperity and Reunification of the Ko.
- Veriza, R. A., Sukyadi, D., & Triarisanti, R. (2021). Assertive Speech Act of President Moon Jae-In's Speeches as a Representation of South Korea Diplomacy Towards North Korea. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 486-493.
- Yonhap News Agency. (2021, Oktober 5). *Only 44 pct of S. Koreans think unification with N.K. necessary: poll*. Retrieved Desember 5, 2022, from Yonhap News Agency: https://en.yna.co.kr/view/AEN20211005008100325?utm_medium=email&_hsmi=169672720&_hsenc=p2ANqtz-9v8-URB8QwoVif_o5AgDt1SBaucJ0arKuZqEWg52x07XT10IApKe5mHuA1hIXDSfvtSSK6rkPMOyQdfRRux3o0MXEBVg&utm_content=169672720&utm_source=hs_email